

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR: 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TIM KEGIATAN DISKUSI KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL  
DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendapatkan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana kondisi iklim usaha yang ada dalam dunia pekerjaan konstruksi di Indonesia, perlu dilakukan Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. Bahwa diperlukan sumber daya dalam pelaksanaan Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota pada Tim Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional dalam Perluasan Kesempatan Usaha di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LKPP TENTANG TIM KEGIATAN DISKUSI KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Membantu pelaksanaan Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di daerah;
- b. Menyiapkan kebutuhan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di daerah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 1 (satu) kegiatan.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Diskusi Kajian Pengembangan Iklim Usaha Nasional Dalam Perluasan Kesempatan Usaha Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan

kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2015

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**ROBIN ASAD SURYO**

Tembusan:

1. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
2. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN DISKUSI KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 6 TAHUN 2015**  
**TANGGAL : 11 AGUSTUS 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN DISKUSI KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA NASIONAL  
DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA DI BIDANG PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

Propinsi Sulawesi Selatan		
No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Penanggung jawab	: H. Ashari, S.I.P. M.Si.
2.	Ketua	: Rusdy
3.	Anggota	: Ayu Pratiwi

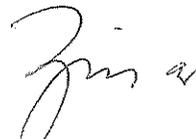
Propinsi Jawa Barat		
No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Penanggung jawab	: Daddi Herdiawan, M.Sc.
2.	Ketua	: M. Taufik, B.E.
3.	Anggota	: Egy Fernandi, S.T.

Propinsi Nusa Tenggara Timur		
No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Penanggung jawab	: Ir. M. Nur Kuswandana, M.Eng.Sc.
2.	Ketua	: Drs. P.E. Indrato, M.Si.
3.	Anggota	: Emmy Sutrisni

Propinsi Sumatera Barat		
No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Penanggung jawab	: Muh. Mario Said
2.	Ketua	: Surahman Suriady
3.	Anggota	: Muhammad Jusriadi

Propinsi Kalimantan Barat		
No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Penanggung jawab	: Hari Surachman
2.	Ketua	: Deviyanti Lismana, S.H.
3.	Anggota	: Iwan Seftiawan

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**ROBIN ASAD SURYO**